



**Ranah Research**

E-ISSN: 2655-0865

**Journal of Multidisciplinary Research and Development**

082170743613

ranahresearch@gmail.com

<https://jurnal.ranahresearch.com>



DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i4>

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## **Perilaku Birokrasi dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat (Studi tentang Pelaksanaan Pembangunan Kampung di Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama)**

**Nurhayati Doran<sup>1</sup>, Muhamamd Guzali Tafalas<sup>2</sup>, Rulinawaty<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Terbuka Indonesia,

<sup>2</sup> Universitas Terbuka Indonesia,

<sup>3</sup> Universitas Terbuka Indonesia,

Corresponding Author: [Nurhayatidoran9@gmail.com](mailto:Nurhayatidoran9@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *The study employed a qualitative method with a descriptive design. Data sources included informants' statements and actions, as well as primary and secondary data. The data collection procedure consisted of four stages: pre-fieldwork, fieldwork, data processing, and report writing. The findings reveal that active community participation at every stage of development is a key factor in ensuring success. Nevertheless, community participation in Wasior District remains relatively low. Bureaucratic behavior has not effectively boosted participation, as indicated by suboptimal leadership, communication, and education. Moreover, coordination between the District Head and branch offices or district-level agencies has not been executed in accordance with the established work plan. Low education levels among the local population impede their ability to participate effectively. Meanwhile, the capacity-building efforts directed toward village government officials and community institutions are still not optimal. Over the past five years, development programs have predominantly been driven by higher-level governmental directives, leaving community aspirations inadequately addressed. Additionally, customary regulations regarding land ownership pose significant obstacles to the implementation of development programs and adversely affect overall community participation.*

**Keyword:** *Bureaucratic Behavior, Community Participation, Village Development, Leadership, Communication*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengkaji arti penting perilaku birokrat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kampung; dan (2) menganalisis perilaku birokrat yang meliputi aspek kepemimpinan, komunikasi, serta pendidikan dalam pembangunan kampung. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Sumber data berupa kata-kata, tindakan informan, data primer, dan data sekunder. Prosedur pengumpulan data terdiri atas empat tahapan, yaitu pra lapangan, pekerjaan lapangan, pengolahan data, serta penulisan laporan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan merupakan faktor kunci keberhasilan. Meski demikian, tingkat partisipasi masyarakat di Distrik Wasior tergolong rendah. Perilaku birokrat belum sepenuhnya mendorong peningkatan partisipasi, yang

tercermin dari belum optimalnya aspek kepemimpinan, komunikasi, dan pendidikan. Selain itu, koordinasi antara Kepala Distrik dengan Cabang Dinas maupun instansi tingkat distrik belum berjalan sesuai program kerja yang ditetapkan. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat menghambat kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara efektif. Di sisi lain, pembinaan aparat pemerintah kampung dan kelembagaan masyarakat masih belum optimal. Selama lima tahun terakhir, pembangunan didominasi oleh program dari pemerintah tingkat atas, sementara aspirasi masyarakat kurang diperhatikan. Adat-istiadat terkait kepemilikan tanah juga menghambat pelaksanaan pembangunan dan memengaruhi partisipasi masyarakat secara keseluruhan.

**Kata Kunci:** Perilaku Birokrat, Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Kampung, Kepemimpinan, Komunikasi

---

## PENDAHULUAN

Pembangunan nasional pada hakikatnya adalah upaya mewujudkan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya serta pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Proses pembangunan ini mencakup seluruh aspek kehidupan, dan hasilnya harus dirasakan oleh seluruh rakyat secara adil dan merata. Dengan demikian, pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat, terutama melalui peningkatan kemampuan sumber daya manusia, termasuk di wilayah pedesaan. Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat, mengingat sebagian besar penduduk Indonesia bermukim di pedesaan.

Keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap fase pembangunan merupakan salah satu ukuran keberhasilan. Pembangunan yang dilakukan hanya oleh pemerintah tanpa melibatkan masyarakat dipandang kurang efektif, karena peran serta masyarakat tidak sekadar mempercepat pencapaian tujuan, tetapi juga menjamin keberlanjutan hasil pembangunan. Dalam kondisi ideal, pembangunan mestinya dikerjakan oleh masyarakat itu sendiri, sementara pemerintah bertindak sebagai pembina dan pemberi arahan teknis (*agent of development*). Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan seringkali bersifat *top-down* dan sentralistik. Masyarakat masih cenderung menjadi objek daripada subjek pembangunan, sehingga partisipasi yang terjadi kerap berada pada tataran formalitas.

Dominasi pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan minimnya kepedulian masyarakat. Moeljarto (2001) menegaskan bahwa birokrasi acap kali lebih berperan sebagai mobilisator massa daripada artikulator aspirasi masyarakat. Selama Orde Baru, kebijakan yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi nasional telah menimbulkan disparitas di berbagai wilayah, sehingga masyarakat cenderung bersikap apatis dan enggan berpartisipasi. Senada dengan itu, Soetrisno (1995) memandang konsep partisipasi di Indonesia masih berada pada tataran retorika, belum menjadi falsafah pembangunan.

Sebagai reaksi atas dampak negatif dari pendekatan pertumbuhan yang sentralistik, pemerintah mulai mengembangkan paradigma pembangunan berorientasi masyarakat (*people-centered development*). Aparatur pemerintah selaku birokrasi yang mengemban tugas penyelenggaraan pemerintahan diharapkan memprioritaskan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Dengan pemahaman dan perilaku birokrasi yang tepat—meliputi aspek kepemimpinan, komunikasi, dan pendidikan—masyarakat diyakini dapat terdorong untuk berpartisipasi secara aktif dalam setiap program pembangunan (Rulinawaty, 2024)

Namun, praktik lapangan kerap menunjukkan perilaku birokrat yang dominan—mulai dari tahap perencanaan hingga pengawasan—menyebabkan masyarakat hanya berperan sebagai penerima. Di Distrik Wasior, misalnya, masih ditemukan rendahnya partisipasi

masyarakat dalam menyampaikan usulan pembangunan, minimnya kehadiran warga dalam rapat perencanaan, hingga terbatasnya keterlibatan mereka dalam pemeliharaan hasil-hasil pembangunan. Fenomena ini penting dikaji lebih jauh guna memahami faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dan peran perilaku birokrat dalam meningkatkan partisipasi tersebut.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih untuk menggali dan memahami secara mendalam fenomena sosial, terutama perspektif dan pengalaman subjektif para informan. Desain deskriptif memungkinkan peneliti mencatat, mengamati, serta menginterpretasikan proses atau kegiatan organisasi dalam kurun waktu tertentu secara terperinci, sehingga peneliti dapat memetakan masalah penelitian secara komprehensif.

Penelitian ini memanfaatkan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

### **1. Data Primer**

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interviews) dan observasi langsung terhadap informan yang dianggap berkompeten serta memiliki keterkaitan dengan tema penelitian, yaitu perilaku birokrat dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kampung. Informan dipilih dengan mempertimbangkan relevansi dan keterlibatan langsung dalam proses birokrasi, kebijakan, dan aktivitas masyarakat.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder meliputi dokumen, laporan resmi, serta arsip yang berkaitan dengan birokrasi dan pembangunan kampung. Dokumen-dokumen ini menjadi sumber pendukung dalam memahami konteks penelitian, memperkuat data primer, serta memperkaya analisis.

Pengumpulan data dilakukan melalui empat tahap utama guna menjamin keteraturan dan kelengkapan data:

#### **1. Pra Lapangan:**

Peneliti melakukan persiapan dengan menentukan lokasi penelitian, menyusun instrumen penelitian (panduan wawancara dan lembar observasi), serta menetapkan kriteria pemilihan informan.

#### **2. Pekerjaan Lapangan:**

Tahap ini berfokus pada pelaksanaan wawancara mendalam dan observasi. Peneliti mencatat pernyataan informan dan situasi faktual di lapangan, khususnya terkait keterlibatan birokrat dan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan kampung.

#### **3. Pengolahan Data:**

Semua data yang terkumpul (transkrip wawancara, catatan lapangan, dan dokumen pendukung) diorganisir dan direduksi. Peneliti merangkum, mengkategorikan, dan memberi kode (coding) pada data berdasarkan tema yang relevan.

#### **4. Penulisan Laporan:**

Peneliti menyusun laporan penelitian dengan menyimpulkan hasil temuan, membahasnya dengan kerangka teori yang relevan, dan memberikan rekomendasi yang didukung oleh data dan analisis.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, mengacu pada prosedur yang disarankan Moleong (1999), yaitu:

##### **1. Analisis Deskriptif**

Peneliti mengembangkan kategori-kategori yang sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, setiap kategori dianalisis untuk memahami pola, hubungan, atau fenomena yang muncul.

##### **2. Interpretasi Data**

Hasil analisis deskriptif diinterpretasikan dengan merujuk pada teori yang relevan. Langkah ini untuk menggali makna dan membangun pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengaruh perilaku birokrat terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan kampung.

Untuk memastikan kredibilitas dan keandalan data, peneliti menerapkan beberapa strategi:

1. Triangulasi

Membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumen tertulis guna mengonfirmasi kebenaran temuan.

2. Transferabilitas (Transferability)

Memberikan deskripsi mendalam tentang latar dan konteks penelitian, sehingga pembaca dapat menilai sejauh mana temuan penelitian ini dapat diterapkan pada konteks lain yang sejenis.

3. Dependabilitas (Dependability)

Mencatat setiap prosedur penelitian secara sistematis agar penelitian dapat direplikasi dan dipertanggungjawabkan.

4. Konfirmabilitas (Confirmability)

Meminimalkan bias peneliti dengan melakukan pengecekan ulang interpretasi, meminta klarifikasi dari informan saat ditemukan data yang meragukan, serta menjaga independensi temuan penelitian.

Melalui metodologi yang sistematis ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan tepercaya mengenai peran perilaku birokrat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan kampung.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perilaku Birokrat**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku birokrat di Kabupaten Teluk Wondama, khususnya di Distrik Wasior, berpengaruh signifikan terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Rulinawaty, 2022). Tiga aspek perilaku birokrat yang menjadi fokus perhatian adalah kepemimpinan, komunikasi, dan pendidikan.

1. Kepemimpinan

Bupati selaku pemimpin pemerintahan secara rutin mengadakan pertemuan dengan pimpinan instansi, memberikan pengarahan dan motivasi, serta menjalin komunikasi intensif dengan para kepala distrik. Melalui kunjungan kerja ke kampung-kampung, Bupati berupaya menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Namun demikian, temuan di lapangan menunjukkan bahwa upaya kepemimpinan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh aparatur di tingkat pelaksana. Beberapa pejabat teknis tidak melaporkan pelaksanaan proyek secara menyeluruh kepada kepala distrik, sehingga menimbulkan kesenjangan informasi antara pihak pemerintah daerah dan masyarakat.

2. Komunikasi

Pada prinsipnya, Bupati mewajibkan setiap instansi mensosialisasikan program pembangunan kepada masyarakat sebelum dilaksanakan. Langkah ini bertujuan membangun kesamaan pemahaman mengenai sasaran dan manfaat kegiatan. Akan tetapi, di tingkat distrik dan kampung, proses komunikasi ini kerap terhambat oleh kurangnya koordinasi, minimnya sarana komunikasi, serta keterbatasan akses transportasi. Akibatnya, banyak program tidak diketahui sepenuhnya oleh masyarakat maupun aparat distrik, sehingga partisipasi warga menjadi rendah.

3. Pendidikan

Pemerintah daerah telah menyediakan berbagai pelatihan, seperti teknik penyusunan rencana pembangunan kampung dan manajemen keuangan desa. Upaya ini juga dilengkapi dengan pelibatan pegawai sekretariat distrik dan masyarakat lokal dalam kegiatan-kegiatan

peningkatan keterampilan. Meski demikian, intensitas pelatihan belum merata dan belum didukung oleh sarana pendukung yang memadai. Rendahnya tingkat pendidikan formal masyarakat juga berdampak pada terbatasnya kapasitas mereka untuk memahami dan menjalankan program pembangunan secara mandiri.

### **Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kampung**

Kajian ini menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat sebagai kunci keberhasilan pembangunan kampung. Secara umum, partisipasi masyarakat di Distrik Wasior dianalisis melalui empat tahapan pokok, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemeliharaan.

#### **1. Keterlibatan dalam Perencanaan**

Proses perencanaan di Distrik Wasior sejatinya mengikuti mekanisme bottom-up melalui Musyawarah Pembangunan Kampung dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat distrik. Meski terdapat upaya pemerintah distrik untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat, sering terjadi bahwa usulan warga tidak direspons dengan baik di level kabupaten. Kondisi ini menimbulkan apatisme warga karena mereka merasa aspirasinya tidak diakomodir, sehingga turut melemahkan partisipasi dalam proses perencanaan.

#### **2. Keterlibatan dalam Pelaksanaan**

Sebagian besar proyek pembangunan di Distrik Wasior bersifat top-down dan ditangani oleh kontraktor yang ditunjuk oleh pemerintah tingkat atas. Proses ini membuat masyarakat tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan proyek, meski mereka memiliki kemampuan atau keterampilan yang bisa berkontribusi. Akibatnya, warga merasa hanya menjadi penonton dan tidak memiliki rasa kepemilikan (sense of ownership) terhadap hasil pembangunan.

#### **3. Keterlibatan dalam Pengawasan**

Pada hakikatnya, pengawasan oleh masyarakat dapat mencegah penyimpangan dan menjamin mutu pembangunan. Masyarakat di Distrik Wasior sebenarnya menunjukkan kesadaran awal untuk mempertimbangkan aspek keamanan dan keberlanjutan dalam setiap rencana proyek. Namun, keterlibatan mereka menjadi sulit ketika mereka tidak dilibatkan dalam perencanaan atau tidak mendapat penjelasan memadai. Minimnya transparansi membuat masyarakat tidak mengetahui target maupun standar proyek, sehingga pengawasan lebih sering dilakukan sepihak oleh aparat birokrasi.

#### **4. Keterlibatan dalam Pemeliharaan**

Hasil penelitian mengungkap bahwa masyarakat relatif aktif memperbaiki dan memelihara fasilitas yang mereka butuhkan, seperti jembatan dan jalan yang rusak. Kegiatan gotong-royong dengan melibatkan pemerintah dan pihak swasta menjadi wujud konkrit partisipasi pada tahap pemeliharaan. Namun, jika hasil pembangunan dirasa kurang relevan atau tidak bermanfaat, masyarakat cenderung tidak peduli bahkan kadang membiarkannya rusak.

### **Faktor-Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat**

#### **1. Pergeseran Nilai dan Konsep Pembangunan**

Sejak era sentralisasi, banyak kebijakan pembangunan bersifat top-down. Masyarakat sering diposisikan sebagai objek yang pasif tanpa didukung pembinaan untuk meningkatkan kapasitas. Akibatnya, tumbuh ketergantungan kepada pemerintah, yang berdampak pada lemahnya kemandirian warga.

#### **2. Koordinasi yang Lemah**

Berbagai proyek tidak selalu berkoordinasi dengan pemerintah distrik dan kampung. Proyek dari kabupaten kerap masuk langsung ke kampung tanpa melibatkan kepala distrik

sebagai koordinator. Minimnya rapat koordinasi dan keterbatasan sarana kantor maupun pendanaan operasional menjadi kendala utama.

### 3. Hak Adat

Tanah adat memiliki nilai sakral dan kepemilikannya diatur secara turun-temurun. Pembangunan yang tidak memperhatikan proses musyawarah dengan pemilik hak ulayat sering memicu konflik akibat tuntutan ganti rugi atau ketidaksepakatan atas pemanfaatan lahan.

### 4. Rendahnya Tingkat Pendidikan

Rendahnya pendidikan formal menghambat kemampuan masyarakat untuk memahami substansi pembangunan dan memanfaatkan peluang yang ada. Kurangnya wawasan membuat sebagian warga beranggapan bahwa pembangunan semata-mata tanggung jawab pemerintah.

## Pembahasan

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa perilaku birokrat (kepemimpinan, komunikasi, dan pendidikan) berperan penting dalam menggerakkan partisipasi masyarakat di Distrik Wasior. Model pendekatan partisipatif idealnya menuntut kepekaan birokrasi dalam merespons aspirasi masyarakat sejak tahap perencanaan, agar tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Sejalan dengan pendapat Soetrisno (1995), partisipasi akan tumbuh apabila konsepnya tidak hanya menjadi retorika, melainkan tercermin dalam kebijakan dan tindakan nyata pemerintah (Rulinawaty, 2021)

Proses pembangunan berorientasi bottom-up pun mensyaratkan koordinasi yang baik, transparansi informasi, dan peningkatan kapasitas masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan. Hal tersebut akan mendorong warga untuk berdaya dan aktif mengawasi, melaksanakan, serta memelihara hasil pembangunan. Namun, temuan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar proyek masih bersifat top-down dan berorientasi proyek (Kartasmita, 1997). Situasi ini mengurangi ruang masyarakat untuk terlibat secara maksimal. Di samping itu, hak adat dan rendahnya tingkat pendidikan menjadi tantangan struktural yang perlu diatasi melalui kebijakan lebih komprehensif, termasuk upaya pemberdayaan, penyuluhan, dan penguatan kelembagaan lokal.

Dengan demikian, keberhasilan pembangunan kampung di Distrik Wasior tidak cukup hanya mengandalkan inisiatif birokrasi dan ketersediaan anggaran. Perlu dibangun kemitraan yang sinergis antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain (swasta, LSM, maupun tokoh adat). Kemitraan ini menuntut perencanaan bersama (co-design), pelaksanaan inklusif (co-production), serta evaluasi dan pengawasan kolaboratif (co-evaluation), agar partisipasi masyarakat tidak hanya bersifat seremonial melainkan menjelma menjadi kekuatan utama pembangunan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan temuan dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

### 1. Perilaku Birokrat

Birokrasi di Distrik Wasior, terutama dalam aspek kepemimpinan, komunikasi, dan pendidikan, belum sepenuhnya mendukung peningkatan partisipasi masyarakat. Hal ini tampak dari masih dominannya pendekatan top-down, kurangnya sosialisasi program, serta terbatasnya pembinaan aparatur dan masyarakat.

### 2. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat terlihat masih rendah di berbagai tahapan pembangunan—perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemeliharaan. Meskipun dalam beberapa kasus masyarakat bersedia bergotong royong merawat infrastruktur, proses

- perencanaan dan pelaksanaan proyek sering kali tidak melibatkan warga secara memadai.
3. Faktor Penghambat  
Sejumlah faktor menghambat partisipasi masyarakat, antara lain:
    - a. Pergeseran nilai dan konsep pembangunan yang cenderung sentralistik.
    - b. Lemahnya koordinasi antarpemangku kepentingan, baik di tingkat distrik maupun kabupaten.
    - c. Hak adat atas kepemilikan tanah yang memicu tuntutan ganti rugi tinggi dan konflik pemanfaatan lahan.
    - d. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, sehingga membatasi pemahaman mereka terhadap substansi dan tujuan pembangunan.
  4. Implikasi Terhadap Pembangunan Rendahnya partisipasi masyarakat berdampak pada kurang optimalnya hasil pembangunan,
  5. terutama karena masyarakat tidak merasa memiliki (sense of ownership). Pembangunan yang didominasi oleh birokrasi pusat atau tingkat atas rentan mengabaikan aspirasi dan kondisi lokal.

## REFERENSI

- Bryant, C., & White, L. G. (1989). *Managing development in the third world*. Westview Press.
- Daeng, H. S. (2000). *Interaksi dan transformasi sosial budaya*. Pustaka Pelajar.
- Indonesia. (1979). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor ....
- Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor ....
- Kartasasmita, G. (1996). *Pembangunan untuk rakyat: Integrasi, desentralisasi, dan demokrasi*. Cidesindo Press.
- Kartasasmita, G. (1997). *Administrasi pembangunan: Peran birokrasi dalam pembangunan nasional*. Penerbit Universitas Terbuka.
- Kementerian Dalam Negeri. (1981). *Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Kementerian Dalam Negeri. (1984). *Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1984*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Kementerian Dalam Negeri. (1984). *Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1984*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Kementerian Dalam Negeri. (2010). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Korten, D. C. (1995). "People-Centered Development: Alternatives for a World in Crisis." Dalam T. Moeljarto (Ed.) *Politik dan kebijakan pembangunan: Kritik atas paradigma pembangunan Indonesia* (hlm. 40–46). Tiara Wacana.
- Mikkelsen, B. (1999). *Methods for development work and research: A new guide for practitioners*. Sage Publications.
- Milhaud (1982). Dalam *Ndraha (1982)*. (Catatan: Bila hanya dikutip di dalam buku Ndraha, maka data pustaka utama merujuk pada buku Ndraha. Nama Milhaud dapat dicantumkan dalam teks sebagai "dalam Ndraha, 1982").
- Moeljarto, T. (1995). *Politik dan kebijakan pembangunan: Kritik atas paradigma pembangunan Indonesia*. Tiara Wacana.
- Moeljarto, T. (1999). *Pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat*. Gadjah Mada University Press.

- Moeljarto, T. (2001). *Birokrasi dan pembangunan di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Moleong, L. J. (1999). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mubyarto. (1984). *Sistem dan moral ekonomi Indonesia*. LP3ES.
- Ndraha, T. (1982). *Pembangunan desa dan pemberdayaan*. Bina Aksara.
- Ndraha, T. (1986). *Pemberdayaan masyarakat desa*. Bina Aksara.
- Ndraha, T. (1989). *Metodologi ilmu pemerintahan*. Bina Aksara.
- Rulinawaty, R. (2022). Fresh Insights Using Ardl Bound Testing Approach and Analysis of Public Economic Growth Affecting Environmental Quality in Indonesia. *Jurnal Manajemen Industri Dan Logistik*, 6(1), 149-161.
- Rulinawaty, R., Andriyansah, A., Santosa, A., Fadillah, S., Karyana, A., & Efendi, Y. (2024, September). Management model of food big data for national food security policy. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 3065, No. 1). AIP Publishing.
- Rulinawaty, R., Andriyansah, A., Santosa, A., Fadillah, S., Karyana, A., & Efendi, Y. (2024, September). Management model of food big data for national food security policy. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 3065, No. 1). AIP Publishing
- Rulinawaty, R., Darojat, O., & Sudrajat, A. Collective Organizational Engagement to Enhance Organizational Performance: Case of Indonesia Office Services. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 26(2), 127-143.
- Rulinawaty, R., Risnashari, R., & Lince, R. (2021). “Orang Kampung”, Pemasaran Digital, dan Kebijakan Publik: sebuah Tinjauan dan Agenda Penelitian. Studi Kasus: Pemasaran Tradisional Songko Recca. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 5(1), 575-585.
- Siagian, S. P. (1988). *Teori dan praktik kepemimpinan*. Rineka Cipta.
- Siagian, S. P. (1994). *Administrasi pembangunan: Konsep, dimensi, dan strateginya*. Bumi Aksara.
- Soetrisno, L. (1995). *Partisipasi dan pembangunan di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Supriatna, N. (1997). *Pendidikan sebagai agen perubahan sosial*. Pustaka Pelajar.
- Susanti, H., dkk. (1995). “Pendidikan dan pembangunan ekonomi.” Dalam *Kumpulan studi mengenai pendidikan di Indonesia* (hlm. 110–115). Pustaka Pelajar.
- Tjokroamidjodjo, B. (1995). *Pengantar administrasi pembangunan*. Gunung Agung.
- Winardi. (2000). *Pengantar teori organisasi*. PT RajaGrafindo Persada.